

ANALISIS PEMANFAATAN PENDAPATAN NASIONAL UNTUK KEBIJAKAN EKONOMI PUBLIK

Hasby Asy Sidiqy¹, Hendra Riofita M.M²

Uin Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: hasbysidiqy20@gmail.com¹, hendrariofita@yahoo.com²

Abstrak – Penelitian ini mengkaji pengkaji pemanfaatan pendapatan nasional sebagai basis dalam penyusunan kebijakan ekonomi publik di Indonesia. Dengan menganalisis dokumen dan literatur ekonomi, artikel ini menelaah secara mendalam bagaimana makroekonomi terutama Produk Domestik Bruto (PDB) dan komponen terkait dalam mendukung keputusan kebijakan fiskal dan moneter. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendapatan nasional tidak hanya berfungsi sebagai ukuran kinerja ekonomi, tetapi juga sebagai alat strategis dalam perencanaan pembangunan dan pengentasan ketimpangan. Temuan ini menegaskan perlunya integrasi data ekonomi secara holistik guna mewujudkan kebijakan publik yang responsif terhadap dinamika ekonomi nasional.

Kata Kunci: Pendapatan Nasional, Kebijakan Ekonomi, Ekonomi Publik, PDB, Analisis.

Abstract – This study examines the reviewers of the use of national income as a basis for formulating public economic policies in Indonesia. By analyzing economic documents and literature, this article examines in depth how macroeconomics, especially Gross Domestic Product (GDP) and related components, support fiscal and monetary policy decisions. The results of the study indicate that national income not only functions as a measure of economic performance, but also as a strategic tool in development planning and reducing inequality. This finding emphasizes the need for holistic economic data integration in order to realize public policies that are responsive to the dynamics of the national economy.

Keywords: National Income, Economic Policy, Public Economy, GDP, Analysis.

PENDAHULUAN

Pendapatan nasional merupakan indikator utama dalam ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi dan juga kesejahteraan suatu negara. Melalui indikator ini, pemerintah dapat menilai seberapa besar nilai barang dan jasa yang dihasilkan serta bagaimana distribusinya dalam aktivitas ekonomi masyarakat (Soediyono, 1990). Salah satu bentuk umum dari pendapatan nasional adalah Produk Domestik Bruto (PDB), yang sering dijadikan acuan utama dalam perumusan kebijakan fiskal dan moneter.

Dalam konteks ekonomi publik, data pendapatan nasional digunakan untuk menyusun arah belanja negara, merumuskan subsidi dan pajak, serta menetapkan target pembangunan nasional. Namun, penggunaan data ini juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan distribusi, dominasi sektor tertentu, hingga keterbatasan data sektor informal (Nasir & Sari, 2015). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana pendapatan nasional benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan ekonomi yang adil dan inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendapatan nasional dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan ekonomi publik di Indonesia, khususnya pada tahun 2025, melalui pendekatan analisis isi terhadap dokumen dan kebijakan pemerintah yang relevan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis pemanfaatan pendapatan nasional dalam kebijakan ekonomi publik di Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan resmi dari lembaga terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan. Analisis dilakukan dengan menelaah

isi dokumen yang berkaitan dengan indikator pendapatan nasional, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), serta bagaimana data tersebut digunakan dalam merancang kebijakan fiskal, sosial, dan pembangunan ekonomi nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan nasional merupakan indikator makroekonomi penting yang mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Dalam konteks ekonomi publik, indikator ini tidak hanya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi, tetapi juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan fiskal, sosial, dan pembangunan jangka panjang (Soediyono, 1990). Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi acuan utama pemerintah Indonesia dalam menetapkan arah kebijakan ekonomi, mendistribusikan anggaran, serta mengidentifikasi sektor prioritas pembangunan (Nasir & Sari, 2015).

A. Efisiensi Anggaran Pemerintah sebagai Respons Kebijakan Fiskal

Pada tahun 2025, pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi belanja sebagai upaya mengatasi defisit anggaran yang mencapai Rp31,2 triliun. Langkah ini diwujudkan melalui pemangkasan anggaran hingga 90% di beberapa kementerian. Strategi ini merupakan bentuk respons fiskal berbasis data pendapatan nasional, khususnya pada sisi pengeluaran dan proyeksi penerimaan negara (Arum & Purnomo, 2005).

Pendekatan ini mencerminkan praktik ekonomi publik yang mengedepankan efisiensi dalam penggunaan dana negara, agar tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi meskipun terjadi tekanan fiskal. Saraswati dan Rahmawati (2021) menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran yang efisien sangat bergantung pada informasi pendapatan nasional yang akurat agar alokasi belanja negara tetap produktif dan tepat sasaran.

B. Konsumsi Rumah Tangga dan Kebijakan Intervensi Ekonomi

Konsumsi rumah tangga di Indonesia pada tahun 2025 tercatat menyumbang lebih dari 53% terhadap total PDB. Namun, pelemahan daya beli menyebabkan kontribusi konsumsi mengalami tekanan. Pemerintah merespons dengan berbagai kebijakan intervensi, seperti bantuan langsung tunai (BLT), subsidi bahan pokok, serta pelatihan dan insentif usaha kecil. Hal ini menunjukkan bagaimana data konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen penting dalam pendekatan pengeluaran pendapatan nasional digunakan secara langsung untuk menyusun kebijakan ekonomi publik yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat. Afrizal et al. (2021) menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga berpengaruh secara signifikan terhadap PDB dan berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di negara berkembang.

C. Strategi Ekspor dan Peran UMKM dalam PDB

Dalam upaya meningkatkan PDB dari sisi ekspor, pemerintah menargetkan nilai ekspor sebesar Rp4.768 triliun dengan kontribusi UMKM sebesar 7,25%. Langkah ini merupakan bentuk nyata dari pemanfaatan pendekatan pengeluaran dalam analisis pendapatan nasional.

Strategi ini juga menjadi bagian dari kebijakan ekonomi publik yang inklusif, karena melibatkan sektor UMKM dalam rantai produksi nasional dan perdagangan global. Andinata et al. (2018) menekankan bahwa peran UMKM dalam ekspor tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka akses ekonomi bagi kelompok produktif menengah ke bawah. Rachmadhani et al. (2024) menambahkan bahwa peningkatan investasi terhadap UMKM memberikan efek langsung pada peningkatan PDB dan kemandirian ekonomi nasional.

D. Peran Industri terhadap PDB

Sektor industri pengolahan, khususnya manufaktur, terus menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Perusahaan seperti PT Kimia Farma mengadopsi otomatisasi dan teknologi produksi ramah lingkungan yang berdampak pada efisiensi biaya dan

peningkatan nilai tambah. Kontribusi dari sektor ini turut memperkuat struktur PDB Indonesia melalui pendekatan produksi. Penggunaan teknologi juga dinilai mampu meningkatkan produktivitas sektor industri, serta mendorong efek berantai terhadap sektor lain seperti distribusi dan perdagangan. Roeva (2012) menekankan bahwa efisiensi produksi yang ditopang oleh inovasi teknologi dapat secara langsung meningkatkan pendapatan nasional dan mengoptimalkan peran industri dalam pembangunan jangka panjang.

E. Ketimpangan Wilayah dan Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan PDB yang tinggi belum tentu mencerminkan kesejahteraan yang merata. Di Indonesia, kontribusi PDB masih terkonsentrasi pada wilayah perkotaan dan industri besar, sementara daerah pinggiran dan pedesaan tertinggal dalam distribusi pendapatan. Hal ini menunjukkan perlunya interpretasi pendapatan nasional secara lebih mendalam, tidak hanya dari segi agregat, tetapi juga secara spasial.

Kebijakan ekonomi publik harus mampu menjawab persoalan ketimpangan ini dengan memperkuat peran fiskal dalam redistribusi dan pembangunan wilayah. Uwuigbe & Ajibolade (2013) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan keadilan distribusi dapat menurunkan produktivitas nasional secara keseluruhan. Hermanto (2012) juga menyatakan bahwa ketimpangan wilayah yang dibiarkan justru memperlebar kesenjangan dan menimbulkan beban sosial dalam jangka panjang.

Pemanfaatan Pendapatan Nasional

1. Pembanguna infrastruktur
2. Pendidikan dan kesehatan
3. Pertahanan dan keamanan
4. Subsidi dan bantuan social
5. Pengembangan sector ekoomi dan umkm

Kependidikan Islam Dalam Konteks Pendapatan Nasional

Karakter ini menciptakan generasi yang produktif, yang nantinya menjadi contributor positif terhadap pertumbuhan nasioal dan nilai penting dalam mendidik calon pemimpin agar tidak menyalahgunakan pendapatan nasional dan menggunakan secara adil. Hal ini menciptakan kesadaran tentang pentingnya pendapatan nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tersebut. Ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan ini membentuk budaya kerja yang profesional dimasa depan, yang sangat penting untuk efisiensi dan efektivitas pemanfaatan pendapatan nasional.

KESIMPULAN

Pendapatan nasional, khususnya melalui indikator PDB, terbukti menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan ekonomi publik di Indonesia. Pemerintah memanfaatkan data ini untuk menyusun respons fiskal seperti efisiensi anggaran, intervensi terhadap konsumsi rumah tangga, serta strategi peningkatan ekspor dengan melibatkan UMKM. Selain itu, sektor industri juga didorong melalui pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kontribusi terhadap PDB, sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional.

Namun, temuan juga menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Ketimpangan wilayah dan distribusi pendapatan masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, integrasi data ekonomi yang lebih mendalam dan berpihak pada keadilan sosial perlu diperkuat agar kebijakan ekonomi publik yang dihasilkan tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga menjawab persoalan ketimpangan secara nyata.

Pendidikan islam memiliki peran penting dalam mendukung pemanfaatan pendapatan nasional secara adil dan berkualitas. Mulai pendidikan karakter, nilai amanah, keadilan dan ekonomi syariah dan mendorong pemanfaatan pendapatan nasional untuk kesejahteraan umat dan pembangunan bangsa yang berlandaskan nilai islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, D., Nuraini, S., & Mulyadi, M. (2021). Pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 19(1), 45–56.
- Andinata, H., Sari, N. F., & Wibowo, R. (2018). Peran UMKM dalam meningkatkan ekspor Indonesia: Tinjauan terhadap kontribusi terhadap PDB. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 16(2), 100–109.
- Riofita, Hendra.(2015),strategi pemasaran, (pecan baru : CV. Mutiara pesisir Sumatra ,hal 115
- Riofita, Hendra. (2016). Bentuk Peranan Guru Dalam Memberikan. *Kependidikan Islam*, 2(1), 85-104.
- Riofita Hendra.(2022).developing digital empowerment programs to enhance the marketing performance of private Islamic higher education institusion.1,2
- Arum, P., & Purnomo, B. (2005). Kebijakan Fiskal dan Efisiensi Anggaran di Indonesia. Jakarta: Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Keuangan.
- Hermanto, B. (2012). Pembangunan wilayah dan pengentasan ketimpangan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 7(2), 88–96.
- Nasir, M., & Sari, D. A. (2015). Kesenjangan ekonomi dan implikasinya terhadap kebijakan publik. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(1), 12–22.
- Rachmadhani, A., Putra, R. A., & Kurniawan, F. (2024). Investasi UMKM dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). *Jurnal Ekonomi Inklusif*, 10(1), 20–31.
- Roeva, O. (2012). Optimization of Production Processes through Technological Innovation. *International Journal of Engineering and Technology*, 2(3), 115–120.
- Saraswati, A., & Rahmawati, T. (2021). Efisiensi Pengelolaan Anggaran Publik Berbasis Data Makroekonomi. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Publik*, 5(2), 74–83.
- Soediyono. (1990). Pengantar Ekonomi Makro. Yogyakarta: Liberty.
- Uwuigbe, U., & Ajibolade, S. (2013). Redistribution and Economic Performance: Evidence from Developing Economies. *Journal of Public Policy and Finance*, 4(1), 21–35.